Vol. 14, No. 2, Juli 2020
Hal. 111-119

P ISSN 1978-3116
E ISSN 2621-7880

JURNAL
EKONOMI DAN BISNIS

Tahun 2007

PENGARUH DANA DESA DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA, KALIMANTAN, DAN SULAWESI, TAHUN 2015-2018

Titi Liberty Catur Raharja
Rudy Badrudin
E-mail: titilibrty@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is a positive influence of village funds and capital expenditure on economic growth in districts on the Province of Sumatera, Kalimantan, and Sulawesi. Sources of data used are secondary data in the form of detailed reports of village funds, reports on the realization of the Regional Government Budget (APBD), and data on Gross Domestic Regional Product (GDRP) in districts on the Province of Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi period 2015 until 2018 which has been published by Central Bureau of Statistics in Indonesia. The data analysis technique used is quantitative data analysis. The test is conducted in districts on the Province of Sumatera, Kalimantan, and Sulawesi from 2015 until 2018. From the test result obtained the result that: 1) Village funds has no effect on Economic Growth, 2) Capital expenditure has a negative effect on Economic Growth.

Keywords**:** village funds, capital expenditures, economic growth

JEL classification: H72, R11

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Terkait dengan upaya tersebut Indonesia memberlakukan kebijakan otonomi daerah yang mana segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sesuai dengan asas otonomi dan untuk kepentingan rakyat. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah mengesahkan UU Desa No 6 Tahun 2014.

Desa merupakan tingkatan paling kecil di mana suatu otonomi daerah diterapkan dan desa diartikan sebagai ujung tombak pembangunan regional dan nasional, sehingga untuk mencapai pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, pembangunan di Indonesia harus dimulai dari wilayah desa. Alasannya karena sebagian masyarakat tinggal di desa dan hampir beberapa masalah mendasar di negara ini ada di desa, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, kesehatan yang buruk, serta fasilitas sarana prasarana yang tidak memadai. Jika beberapa masalah tersebut bisa teratasi di desa atau bisa dikatakan wilayah desa sudah maju, negara juga akan mengalami hal yang sama. Untuk mengelolanya, desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu dana desa.

Dengan diberikannya dana desa diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi karena dana tersebut akan digunakan untuk biaya modal pembangunan bagi pemerintah dengan cara peningkatan layanan publik, mempromosikan desa, mengatasi kesenjangan desa dan memperkuat rakyat sebagai subyek pembangunan. Alokasi dana desa Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dari tahun 2015-2018 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dikha-

watirkan berpotensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana. Salah satu penyebabnya peraturan pemerintah yang dikeluarkan belum secara mendalam disosialisasikan dan tidak adanya pengawasan atas penggunaan dana tersebut.

Selain dana desa, pemerintah juga mempunyai kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan cara memberikan alokasi dana dalam rupa belanja modal yang diberikan pada setiap wilayah. Belanja modal dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Belanja modal tersebut menghasilkan pembangunan fasilitas umum berupa jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, rumah sakit dan gedung sekolah serta berbagai fasilitas umum lainnya yang memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat (Badrudin, 2017). Tetapi pengelolaan belanja modal oleh pemerintah masih kurang produktif dan belum bisa mengimbangi jenis belanja lain. Hal ini dapar menyebabkan kurangnya kualitas layanan publik.

Dana desa dan belanja modal berasal dari sumber pendanaan yang berbeda tetapi keduanya berkemungkinan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam pengelolaannya agar menunjang pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan variabel yang peneliti gunakan. Penelitian Prasetyanyo (2012) membuktikan bahwa alokasi dana desa pada saat era desentralisasi fiskal berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nurmainah (2013) menghasilkan kesimpulan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tahun 2015-2018.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Teori Keagenan

Teori yang menghubungkan antara pihak pertama *(principal)* yang berperan sebagai pemilik dari sumber daya, yang kemudian memercayakan kepemilikan sumber daya yang dimiliki kepada pihak lain *(agent)* untuk mencapai tujuan *principal* disebut Teori Keagenan *(Agency Theory).* Menurut Jensen & Meckling (1976)the theory of property rights and the theory of finance to develop a theory of the ownership structure of the firm. We define the concept of agency costs, show its relationship to the 'separation and control' issue, investigate the nature of the agency costs generated by the existence of debt and outside equity, demonstrate who bears these costs and why, and investigate the Pareto optimality of their existence. We also provide a new definition of the firm, and show how our analysis of the factors influencing the creation and issuance of debt and equity claims is a special case of the supply side of the completeness of markets problem. The directors of such [joint-stock] companies, however, being the managers rather of other people's money than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it with the same anxious vigilance with which the partners in a private copartnery frequently watch over their own. Like the stewards of a rich man, they are apt to consider attention to small matters as not for their master's honour, and very easily give themselves a dispensation from having it. Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the management of the affairs of such a company. Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776, Cannan Edition. (Modern Library, New York, 1937 munculnya teori keagenan karena adanya kesepakatan bersama antara *agent* dan *principal.*

Interaksi antara *agent* dan *principal* awalnya ketika *agent* memberikan pendapat dan berakhir pada *principal* menerima atau menolak pendapat tersebut. Teori keagenan bermaksud memecahkan konflik antara kedua belah pihak. Permasalahan yang terjadi antara *agent* dan *principal* disebut dengan *agency problems*. Penyebabnya adalah dikarenakan terjadi asimetri informasi. Apabila dikaitkan dengan ini, pengelola dana desa sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal.* Pengelola dana desa *(agent)* tidak menjalankan sesuai ketentuan yang berujung pada terjadinya penyelewengan dana. Hal ini sering terjadi karena *agent* cenderung mementingkan tujuan pribadi dan kelompoknya serta menghindari risiko daripada memaksimalkan kesejahteraan masyarakat *(principal)*.

Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan runtut dari proses pendistribusian anggaran yang berawal dari tingkatan

pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, dalam tujuan sebagai unsur pendukung fungsi ataupun prosedur yang sudah diberikan pemerintah berkaitan dengan layanan dan pemerintahan yang sesuai dengan kewenangan yang sudah diberikan (Saragih, 2014).

Dalam menyelenggarakan desentralisasi fiskal, asas *money should follow function* harus dicermati, yang diartikan pada saat melakukan penyerahan atas wewenang yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak terhadap anggaran yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan. Semakin banyak wewenang dilimpahkan, semakin besar kapasitas dana yang diperlukan. Maka dari itu, prinsip efisiensi merupakan kewajiban dalam penyelenggaraan desentralisasi, sehingga pemerintah harus mampu mewujudkan pemerintahan yang *good governance* yaitu dengan memenuhi prinsip dasar atau asas-asas pengelolaan keuangan daerah, yaitu transparan, efisien, efektif, akuntabilitas, dan partisipatif (Saragih, 2014).

Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan terjadinya perubahan di dalam struktur ekonomi masyarakat secara keseluruhan yang terjadi sebagai sebuah proses transformasi, di mana dengan seiringnya waktu ditandai dengan adanya perubahan dasar dalam prosedur kegiatan ekonomi secara operasional dan juga dalam struktural masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah runtut peristiwa yang dilakukan dalam usaha untuk meningkatkan produksi barang ataupun jasa dalam ekonomi masyarakat. Pembangungan dan petumbuhan ekonomi sama-sama dalam bentuk suatu proses dalam kegiatan ekonomi. Bedanya, pembangunan ekonomi melibatkan perubahan struktur ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak.

Menurut Adam Smith terdapat aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan penduduk dan *output* total. Item pokok yang disampaikan Smith yaitu suatu hal yang berkaitan dengan ketersediaan faktor produksi khususnya tanah, barang modal, dan yang terakhir adalah sumber daya manusia itu. Teori selanjutnya yaitu Teori David Ricardo yang ditandai dengan: 1) Tanah terbatas jumlahnya sehingga sebagai faktor penyekat dalam proses ekonomi, 2) peningkatan tenaga kerja sesuai dengan tingkat upah, 3) Pembagian keuntungan hanya terjadi pada saat keuntungan yang didapatkan lebih besar dari keuntungan minimal yang didapat, 4) teknologi selalu berubah dan berkembang, 5) dominannya sektor pertanian.

Selanjutnya, teori Harrod-Domar bertujuan melengkapi beberapa masalah ekonomi yang belum dibahas di teori pengembangannya yaitu menjelaskan proses jangka panjang dan menghubungkan antara tingkat tabungan, tingkat investasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar menganalisa kriteria yang digunakan agar perekonomian bisa berkembang dan tumbuh dalam jangka panjang.

Teori Solow-Swan yang merupakan teori Neo-Klasik mengembangkan teori Harrod-Domar dengan menambahkan faktor yang mendasar berkaitan dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi yaitu, tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi.

Teori selanjutnya, teori Nicholas Kaldor di mana langkah-langkah dalam penjelasan terkait teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Kaldor disebut dengan *stylized facts*. Ada dua sisi pendekatan melalui *stylized facts*. Pertama, menghubungkan adanya disparitas antara Neo-Keynes dan Neo-Klasik. Sisi kedua, yaitu berkembangnya pemikiran Kaldor terhadap pertumbuhan ekonomi semakin mengarah menuju pemikiran yang memuat masalah-masalah pembangunan ekonomi.

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Keuangan desa dikelola berdasar asas-asas: 1) transparan, prinsip keterbukaan akan informasi, 2) akuntabel, yaitu kewajiban pertanggungjawaban pengelolaan, 3) partisipatif, yaitu mengikutsertakan lembaga desa dan masyarakat, 4) tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan harus mengacu aturan.

Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dipe-

runtukkan untuk kepentingan umum. Belanja modal tersebut menghasilkan pembangunan fasilitas umum berupa jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, rumah sakit dan gedung sekolah serta berbagai fasilitas umum lainnya yang memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat (Badrudin, 2017).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat terutama dalam kegiatan produksi untuk meningkatkan hasil produksi barang dan jasa agar meningkatnya kemakmuran. Pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan menyediakan banyak jenis barang ekonomi yang terus mengalami kenaikan yang dilakukan negara untuk rakyatnya. Kusuma Putra & Nur Pratiwi (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu runtut proses di mana terjadi pertambahan *output* perkapita dalam periode waktu tertentu. Badrudin (2017) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses dalam usaha meningkatkan *output* perkapita dalam jangka panjang.

Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana desa adalah sumber dana dari pemerintah pusat, yang diserahkan kepada desa guna membangun desa. Semakin besar dana desa diberikan, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Prasetyanto (2012)Williamson index and econometric model. This study has successfully formulated a model and using panel data method (time series data of 2005-2009 and cross section data of twenty five Province in Indonesia membuktikan bahwa alokasi dana desa dapat meningkatkan kinerja fiskal yang dimiliki daerah juga meningkatkan perekonomian daerah, di samping itu juga dapat menurunkan jumlah dari penduduk kurang mampu. Hal serupa juga dikemukakan oleh Afrilianto (2017) dan Rimawan & Aryani (2019) yang membuktikan adanya pengaruh positif alokasi dana desa pada pertumbuhan ekonomi. Sementara Handayani & Badrudin (2019) membuktikan bahwa alokasi dana desa belum berdampak secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Mengenai penelitian tersebut dapat dijelaskan jika dana desa dikelola dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka pembangunan desa akan terwujud. Perkembangan ini akan meningkatkan ekonomi di masyarakat.

$\mathbf{H_1}$: Dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tahun 2015-2018.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal digunakan pemerintah sebagai penyediaan infrastruktur dan sarana dan prasarana sebagai salah satu bentuk pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di desa. Pada saat pemerintah membuat kebijakan untuk menetapkan anggaran belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pengeluaran rutin, langkah tersebut sudah tepat untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Telah dilakukan beberapa penelitian oleh Waryanto (2017) juga membuktikan hal serupa adanya pengaruh signifikan tersebut dengan variabel sama. Lain hal dengan Arini S (2016) yang membuktikan bahwa hubungan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan. Tetapi menurut Hakim (2013)(2 menyatakan bahwa tidak seluruh belanja modal mempunyai dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

$\mathbf{H_2}$: Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tahun 2015-2018.

Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh Kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tahun 2015-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling.* Kriteria yang digunakan yaitu seluruh kabupaten di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang menyediakan data mengenai dana desa, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015-2018.

Data yang digunakan peneliti yaitu jenis data deskrit meliputi data jumlah belanja modal, data jumlah alokasi dana desa tiap kabupaten, dan data laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi tahun 2015 sampai dengan 2018. Sumber data menggunakan data sekunder yang peneliti peroleh dan akses melalui *website djpk.Kemenkeu.go.id* untuk dana desa dan belanja modal, serta data pertumbuhan ekonomi melalui situs *bps.go.id*. Variabel independen yang digunakan adalah dana desa dan belanja modal, sedangkan varia-

bel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi.

Pengukuran besarnya dana desa setiap kabupaten/kota dinyatakan dengan nominal mata uang Rupiah (Rp) dengan rumus:

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Afirmasi + Alokasi Formula

Besarnya belanja modal dinyatakan dengan nominal mata uang Rupiah (Rp) dengan perhitungan sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

Laju pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam bentuk persen (%) dengan perhitungan:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRBt - PDRBt\text{-}1}{PDRBt\text{-}1} \times 100\%$$

keterangan:
$PDRB_t$: PDRB tahun terkait
$PDRB_{t-1}$: PDRB tahun sebelum tahun terkait

HASIL PENELITIAN

Data yang digunakan berjumlah 948. Variabel dana desa (DD) kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi memiliki nilai minimum sebesar Rp8.728.910.000 yang dimiliki oleh Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar Rp635.314.441.000 yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 dengan nilai rata-rata sebesar Rp96.886.912.844 dan standar deviasi sebesar Rp74.694.662.299. Variabel belanja modal (BM) kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi menghasilkan nilai minimum sebesar Rp35.427.070.357 yang dimiliki oleh Kabupaten Buton Selatan tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar Rp2.820.501.942.494 yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 dengan nilai rata-rata sebesar Rp281.818.795.437 dan standar deviasi sebesar Rp162.072.078.111.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata – Rata	Standar Deviasi
DD	948	8,728,910,000	635,314,441,000	96,886,912,844	74,694,662,299
BM	948	35,427,070,357	2,820,501,942,494	281,818,795,437	162,072,078,111
PE	948	-11.69	67.82	5.2804	3.17509

Nilai minimum pada variabel pertumbuhan ekonomi (PE) kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yaitu sebesar -11,69% yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Utara tahun 2015. Lalu untuk nilai maksimum diangka 67,82% yang dimiliki oleh Kabupaten Morowali tahun 2015 dengan nilai rata-rata sebesar 5,2804% serta standar deviasi sebesar 3,17509%.

Tabel 2
Uji Normalitas

Signifikansi	Keterangan
0,753	Berdistribusi normal

Diketahui nilai signifikansi sebesar 0,753 > 0,05, artinya data berdistribusi normal. Sehingga data penelitian memenuhi syarat uji normalitas.

Seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* yang sama yaitu sebesar 0,988 dan nilai yang sama pula untuk VIF sebesar 1,012. Karena hasil uji menunjukkan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, dapat ditarik kesimpulan bahwa antar variabel independen bebas multikolinearitas.

Nilai signifikansi variabel dana desa (DD) dan belanja modal (BM) masing-masing memperoleh nilai sebesar 1,000. Kedua hasil nilai signifikansi pada seluruh variabel independen tersebut melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat atau bebas dari heteroskedatisitas.

Tabel 3
Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
DD	0,988	1,012	Bebas Multikolinearitas
BM	0,988	1,012	Bebas Multikolinearitas

Tabel 4
Uji Heteroskedatisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
DD	1,000	Bebas heteroskedatisitas
BM	1,000	Bebas heteroskedatisitas

Tabel 5
Uji Autokorelasi

N	DW	dL	dU	4-dL	4-dU
948	1,907	1,89127	1,89548	2,10873	2,10452
Hasil	Bebas Autokorelasi				

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin Watson* (dw) sebesar 1,907 dengan jumlah variabel independen (k) = 2 dan sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak = 948 dengan demikian diperoleh nilai dL = 1,89127, nilai dU = 1,89548, nilai 4-dL = 2,10873, dan nilai 4-dU = 2,10452 yang berarti nilai dU < dW < 4-dU atau 1,89127 < 1,907 < 2,10452, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 6
Regresi Berganda

Variabel	*Coefficient*	*Standard Error*
Intercept	3,227336	0,459486
DD	0,017270	0,021993
BM	-0,238571	0,038527

Persamaan regresi berganda berdasar Tabel 6 dirumuskan sebagai berikut:

$$PE = 3{,}227336 + 0{,}017270DD - 0{,}238571BM + \varepsilon$$

Nilai *intercept* pada tabel memiliki arti yaitu jika variabel independen baik dana desa (DD) maupun belanja modal (BM) bernilai 0 dengan kata lain tidak terdapat peningkatan maupun penurunan, maka pertumbuhan ekonomi (PE) bernilai 3,227336. Nilai *coefficient* pada dana desa (DD) bernilai 0,017270 bertanda positif menjelaskan bahwa apabila dana desa (DD) terjadi peningkatan sebesar 1%, maka diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0,017270, sedangkan nilai *coefficient* pada belanja modal (BM) bernilai –0,238571 bertanda negatif menjelaskan bahwa apabila belanja modal (BM) terjadi peningkatan sebesar 1%, maka diikuti penurunan pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0,238571.

Tabel 7
Uji Koefisien Determinasi

R Square	0,05097

Koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai R^2 sebesar 0,05097. Dengan demikian, pengaruh dari variabel independen (DD dan BM) terhadap dependennya (PE) sebesar 5,097% di mana sisanya 94,903% dipengaruhi variabel lain selain variabel yang digunakan.

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (Uji T)

No	Hipotesis	Koef. Regresi	t hitung	Prob. Sig.	Prediksi	Temuan
1	Dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi tahun 2015-2018	0,017270	0,785	0,433	Positif	Tidak Terdukung
2	Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi tahun 2015-2018	-0,238571	-6,193	0,000	Positif	Tidak Terdukung

Hipotesis satu yang dikemukakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian hipotesis satu memperoleh hasil bahwa dana desa (DD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,017270 bertanda positif dan nilai t hitung sebesar 0,785 tidak melebihi nilai t tabel yaitu 1,645 serta nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,433 melebihi 0,05, maka hipotesis satu ditolak, artinya dana desa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, hipotesis dua yang dikemukakan penelitian ini bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian hipotesis dua memperoleh hasil bahwa belanja modal (BM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,238571 bertanda negatif, nilai t hitung sebesar -6,193 tidak melebihi nilai t tabel yaitu 1,645 serta nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 tidak melebihi 0,05. Berdasar hasil yang diperoleh, maka hipotesis dua ditolak, artinya belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh peneliti menunjukkan bahwa dana desa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tahun 2015-2018. Hasil tersebut didukung melalui pengujian hipotesis di mana nilai koefisien regresi sebesar 0,017270 bertanda positif dan nilai t hitung sebesar 0,785 tidak melebihi nilai t tabel yaitu 1,645 serta nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,433 melebihi 0,05, maka hipotesis satu ditolak. Dapat dikatakan bahwa pengadaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena adanya potensi terjadinya penyimpangan berupa penyelewengan atau korupsi dana.

Hasil ini didukung oleh penelitian Handayani & Badrudin (2019), namun tidak sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rimawan & Aryani (2019), Atmojo *et al*., (2017), Afrilianto (2017) yang berkesimpulan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian yang telah dilakukan penulis memperoleh hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap belanja modal kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tahun 2015-2018. Hal tersebut dapat dilihat pada pengujian hipotesis di mana nilai koefisien regresi sebesar -0,238571 bertanda negatif, nilai t hitung sebesar -6,193 tidak melebihi nilai t tabel yaitu 1,645 serta nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 tidak melebihi 0,05, maka hipotesis dua ditolak. Berdasar hal tersebut, dapat dikatakan bahwa belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah kurang produktif, atau bisa juga dikarenakan hasil alokasi belum terealisasi dalam jangka waktu pendek atau pembangunan infrastruktur masih tahap proses

sehingga belum memperoleh hasil terhadap belanja modal tersebut.

Hasil tersebut didukung dengan penelitian yang sudah dilakukan (Arini S, 2016), namun hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Nurmainah (2013)labor absorption and the Human Development Index on economic growth and poverty in 35 districts / cities in Central Java Province. This studyuses secondary data. There are variable capital expenditures of local governments, labor absorption and the Human Development Index as an exogenous variable, while economic growth and poverty level as an endogenous variable. Thisstudy uses panel data which combines time series data and cross section. These data were analyzed using Structural Equation Modeling with AMOS 20 program. The results showed that the four proposed hypothesis are accepted and thehypothesis is rejected. Hypothesis 1 suggests that the local government capital expenditure significantly positive effect on economic growth. Hypothesis 2 suggests that the labor absorption significantly positive effect on economic growth. Hypothesis 3 suggests that the Human Development Index significantly positive effect on economic growth. Hypothesis 4 suggests that economic growth no significant effect on poverty. Hypothesis 5 suggests that the Human Development Index is significantly negative effect on povertyKeywords: Capital expenditures of local governments, labor absorpsion, Human Development Index, economic growth, poverty, structural equation model (SEM, Astria (2014) dan Waryanto (2017)the difficulty of achieving national economic growth target, and the low ratio of capital expenditure to Gross Domestic Product (GDP yang menyatakan adanya pengaruh positif dari belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta pada penelitian Hakim (2013)(2 menyatakan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kecuali pada variabel belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal tanah, irigasi, dan jaringan tidak memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi karena belanja tersebut memerlukan pembangunan sehingga harus menunggu sampai aset tersebut selesai dan dapat digunakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dana desa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tahun 2015-2018. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa pengadaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena adanya potensi terjadinya penyimpangan berupa penyelewengan atau korupsi dana. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tahun 2015-2018. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa pengeluaran belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah belum mampu memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kurang produktifnya dalam pengelolaan dana belanja modal atau bisa juga karena hasil alokasi belum terealisasi dalam jangka waktu pendek atau pembangunan infrastruktur masih tahap proses sehingga belum memperoleh hasil terhadap belanja modal tersebut.

Saran

Pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi diharapkan dapat mengelola dana desa dan belanja modal dengan baik dan memberikan pengawasan atas penggunaannya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Semakin baik pengelolaan dan pengawasan tersebut maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel yang digunakan seperti *social welfare* dengan menggunakan Indeks Gini tiap kabupaten untuk menggambarkan bahwa dana desa telah dialokasikan secara efektif dan mengetahui ada tidaknya ketimpangan. Investasi swasta juga bisa ditambahkan guna memperdalam kajian analisis. Hal ini berdasar pada belanja modal kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena tidak produktifnya belanja modal serta hasilnya belum bisa dirasakan dalam jangka waktu pendek. Dalam pengambilan data disarankan untuk memastikan kelengkapan data. Agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat, bervariasi, dan lebih baik dari

penelitian sebelumnya, maka dapat disarankan untuk memanjangkan waktu pengamatan dalam penelitian. Kemudian peneliti diharapkan untuk memperluas ruang lingkup agar mencerminkan seluruh kabupaten yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Afrilianto, A. G. 2017. *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bogor.*

Arini S, P. R. 2016. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan*. *2*(2). https://doi.org/10.26486/jramb.v2i2.284

Astria, S. 2014. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *12*(1). https://doi.org/10.29259/jep.v12i1.4867

Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. 2017. Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi EKonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARIST Sosial Politik Humaniora*, *5*(1).

Badrudin, R. 2017. Ekonomika Otonomi Daerah (2 ed). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hakim, L. 2013. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali). *Jesp*.

Handayani, A. P., & Badrudin, R. 2019. Evaluation of Village Fund Allocation on Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, *20*(3). https://doi.org/10.18196/jai.2003129

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kusuma Putra, C., & Nur Pratiwi, R. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*.

Mudhofar, K., & Tahar, A. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*. https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.176-185

Nurmainah, S. 2013. Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah,Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi kasus 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, *20*(2).

Prasetyanto, E. 2012. *Dampak Alokasi Alokasi Dana Desa Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah Di Indonesia*. 1–207.

Rimawan, M., & Aryani, F. 2019. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *9*(3).

Saragih, J. P. 2014. *Politik Desentralisasi Fiskal Permasalahan Dalam Implementasi*. *5*(2).

Waryanto, P. 2017. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*. https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13